

Article

Implementasi Program Dumisake dan Dinamika Politik Pembangunan Daerah: Studi Kebijakan Umkm di Kecamatan Rimbo Bujang

Mulia Jaya^{1*}, Dedi Epriadi², Marisa Dewi Kurnia Sari³

Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo propinsi Jambi

* Correspondensi Penulis: muliajaya80.umb@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the implementation of the Dumisake Program as a public policy initiative for empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Rimbo Bujang District, Jambi Province. Initiated by the provincial government, the program aims to accelerate post-pandemic economic recovery through direct capital assistance to targeted MSME groups. Using a descriptive qualitative approach and case study method, this research explores the program's input, process, and output stages, as well as the local political dynamics that shape its implementation. Findings reveal persistent challenges, including weak MSME data systems, opaque beneficiary selection, limited training and mentoring, and the prevalence of political patronage influencing aid distribution. These structural and political barriers hinder the program's empowerment objectives. The study recommends reforming program management through digital MSME data development, performance-based evaluation systems, and participatory, accountable governance. With a collaborative governance approach, the Dumisake Program has the potential to serve as a replicable model for inclusive and sustainable grassroots economic policy.*

Keywords: *Dumisake, MSMEs, public policy, program implementation, local politics, regional development*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi Program Dumisake sebagai kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Rimbo Bujang, Provinsi Jambi. Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jambi untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui bantuan modal kepada pelaku UMKM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi tahapan input, proses, dan output program, serta dinamika politik lokal yang memengaruhi pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih terkendala lemahnya basis data, rendahnya transparansi seleksi, minimnya pelatihan dan pendampingan usaha, serta dominasi patronase politik dalam distribusi bantuan. Hambatan struktural dan politis tersebut menghambat tujuan utama pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi manajemen program melalui penguatan basis data digital UMKM, sistem evaluasi berbasis indikator kinerja, serta tata kelola partisipatif dan akuntabel. Dengan pendekatan kolaboratif, Program Dumisake berpotensi menjadi model kebijakan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Dumisake, UMKM, kebijakan publik, implementasi program, politik lokal, pembangunan daerah

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah dalam konteks desentralisasi memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (Antlöv, 2003). Salah satu bentuk konkret dari peran tersebut adalah pelaksanaan program pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM telah lama menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan daerah karena kontribusinya yang signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan penguatan struktur ekonomi kerakyatan (Sumodiningrat & Wulandari, 2016).

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi,

Di Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah menginisiasi Program "Dua Miliar Satu Kecamatan" atau Dumisake sebagai upaya inovatif untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan mengurangi tingkat kemiskinan. Program ini memberikan bantuan langsung berupa modal usaha kepada kelompok-kelompok UMKM dengan kategori tertentu, seperti UMKM milenial, emak-emak, dan wirausaha pemula. Pelaksanaan program Dumisake didelegasikan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi sebagai pelaksana utama di bidang penguatan ekonomi produktif masyarakat (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, 2022).

Kecamatan Rimbo Bujang menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan alokasi dana terbesar dari Program Dumisake. Namun, dalam praktiknya, implementasi program ini diwarnai oleh berbagai tantangan, mulai dari persoalan ketepatan sasaran, distribusi bantuan yang tidak merata antar desa, hingga dinamika politik lokal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Di sinilah pentingnya menelaah secara mendalam bagaimana logika kebijakan daerah bekerja, serta sejauh mana faktor-faktor politik dan administratif memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program Pembangunan (Putra Kesmawan, 2021).

Dalam konteks studi kebijakan, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh aktor-aktor lokal yang memiliki kepentingan beragam (Mazmanian & Sabatier, 1983). Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada analisis input (perencanaan dan penganggaran), proses (mekanisme seleksi, distribusi, dan pendampingan), serta output (hasil dan dampak bantuan) dari Program Dumisake di Kecamatan Rimbo Bujang. Penelitian ini juga memperhatikan dinamika politik yang menyertai pelaksanaan program, termasuk potensi bias politik dalam seleksi penerima manfaat, serta hubungan antarlevel pemerintahan dalam mengelola program ini (Putra Kesmawan & Mutiarin, 2014).

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan evaluasi teknis atas pelaksanaan program, tetapi juga menawarkan perspektif kritis terhadap relasi antara kebijakan publik dan dinamika politik pembangunan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat desain kebijakan pembangunan ekonomi lokal yang lebih adil, akuntabel, dan partisipatif di masa mendatang.

Berdasarkan kondisi diatas, kemudian muncul beberapa pertanyaan seperti: Bagaimana bentuk implementasi Program Dumisake dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang, Apa saja faktor penghambat dalam input, proses, dan output pelaksanaan Program Dumisake, Bagaimana dinamika politik lokal memengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Dumisake dalam pemberdayaan UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program berdasarkan tahapan input, proses, dan output. Menggambarkan dinamika politik lokal yang memengaruhi proses implementasi kebijakan daerah. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yakni Manfaat Teoritis: Menambah khazanah literatur administrasi publik dan ilmu politik lokal terkait implementasi kebijakan pembangunan ekonomi berbasis UMKM. Manfaat Praktis: Memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Kebijakan Publik dalam Konteks Pemerintahan Daerah

Analisis kebijakan publik merupakan fondasi utama dalam proses penyusunan kebijakan yang rasional dan berbasis data. Dalam konteks pemerintahan daerah, proses ini mencakup identifikasi masalah lokal, penyusunan alternatif solusi, dan evaluasi dampak terhadap masyarakat. Pemerintah daerah membutuhkan kerangka analisis yang mampu mengakomodasi kompleksitas persoalan lokal serta kapasitas institusional yang tersedia. Dunn (2003) menyatakan bahwa analisis kebijakan harus melibatkan evaluasi komprehensif terhadap kebutuhan, dampak, dan keberlanjutan program. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan efisien.

Lebih dari sekadar teknokratis, analisis kebijakan dalam pemerintahan daerah juga mencerminkan dinamika politik dan birokrasi yang melekat di dalamnya. Pemerintah daerah tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dalam sistem yang penuh dengan kompromi antaraktor politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, proses analisis kebijakan harus mempertimbangkan aktor-aktor tersebut dan bagaimana mereka mempengaruhi agenda kebijakan. Pendekatan ini juga menuntut adanya pemahaman mendalam tentang tata kelola daerah dan struktur kewenangan yang berlaku (Kesmawan & Marja, 2021).

Konteks lokal yang beragam menuntut metode analisis kebijakan yang bersifat adaptif dan partisipatif. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat, tokoh adat, dan pelaku ekonomi lokal menjadi bagian integral dalam penyusunan kebijakan yang kontekstual. Dror (1971) menekankan bahwa desain kebijakan harus berbasis pada pemahaman sistemik dan terbuka terhadap umpan balik lapangan. Melalui pendekatan ini, kebijakan publik daerah tidak hanya menjadi produk administrasi, tetapi juga hasil dialog sosial yang konstruktif dan demokratis.

Teori Implementasi Kebijakan dan Peran Politik Lokal

Teori implementasi kebijakan memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana suatu kebijakan dijalankan, oleh siapa, dan dalam kondisi apa. Mazmanian dan Sabatier (1983) mengidentifikasi beberapa variabel penting dalam implementasi, antara lain kejelasan tujuan kebijakan, kapasitas sumber daya, dan dukungan politik dari aktor pelaksana. Dalam konteks lokal, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap medan implementasi, kebijakan akan gagal mencapai hasil.

Politik lokal memiliki pengaruh besar terhadap proses implementasi. Aktor politik seperti kepala daerah, DPRD, hingga tokoh informal desa memainkan peran dalam menentukan arah pelaksanaan program. Mereka bisa menjadi fasilitator yang mempercepat pencapaian tujuan kebijakan, namun juga bisa menjadi penghambat jika terjadi politisasi berlebihan. Implementasi Program Dumisake, misalnya, dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antaraktor yang membentuk jaringan kepentingan di tingkat desa. Oleh karena itu, strategi implementasi perlu memperhatikan konstelasi kekuatan lokal yang dapat memengaruhi netralitas dan efektivitas pelaksanaan.

Lebih jauh, integrasi antara birokrasi dan politik dalam implementasi kebijakan harus dijalankan secara akuntabel dan terbuka. Sistem pengawasan dan evaluasi harus melibatkan masyarakat dan lembaga independen agar pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan awal. Dalam kerangka ini, teori implementasi tidak hanya bicara soal teknis pelaksanaan, tetapi juga etika kebijakan dan tanggung jawab sosial pelaksana. Transparansi dalam pelaksanaan akan meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan program pembangunan daerah.

Otonomi Daerah dan Kepemimpinan Kepala Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan ruang yang luas bagi kepala daerah untuk merancang kebijakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Dalam sistem desentralisasi, kepala daerah bukan sekadar administrator pusat, melainkan pemimpin politik yang memiliki kewenangan substantif. Mereka memiliki peran sentral dalam menetapkan prioritas pembangunan, termasuk dalam merumuskan program-program inovatif seperti Dumisake. Kepemimpinan kepala daerah menentukan kecepatan dan arah perubahan di daerah.

Kepemimpinan yang efektif dalam konteks otonomi daerah ditandai dengan kapasitas visioner, kemampuan membangun koalisi kebijakan, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala daerah yang adaptif akan lebih mampu mengintegrasikan aspirasi warga dalam kebijakan yang relevan. Program Dumisake dapat menjadi contoh bagaimana kepala daerah mengambil inisiatif dalam pemberdayaan ekonomi rakyat melalui mekanisme anggaran yang didelegasikan kepada kecamatan dan desa. Namun keberhasilan program sangat tergantung pada gaya kepemimpinan yang mengedepankan kolaborasi dan akuntabilitas.

Di sisi lain, otonomi yang luas juga mengandung risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan jika tidak disertai sistem pengawasan yang kuat. Tanpa akuntabilitas horizontal dan vertikal, kepala daerah dapat menggunakan kebijakan publik sebagai alat politik untuk memperkuat posisi mereka. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan daerah yang mampu menyeimbangkan antara kewenangan dan pertanggungjawaban. Reformasi birokrasi daerah harus diarahkan untuk mendukung kepemimpinan yang inovatif sekaligus transparan.

Pembangunan Daerah dan Tujuannya

Pembangunan daerah tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. Todaro dan Smith (2012) menekankan bahwa pembangunan harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemerataan kesempatan, dan peningkatan kapasitas manusia. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari aspek keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan penguatan institusi lokal. Program seperti Dumisake harus dilihat dalam kerangka pembangunan inklusif yang berkelanjutan.

Tujuan utama dari pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Untuk itu, intervensi kebijakan harus dirancang dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dan keberpihakan pada kelompok rentan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan pembangunan menyentuh lapisan masyarakat yang selama ini termarjinalkan. Dalam konteks ini, pembangunan yang berkeadilan hanya bisa dicapai melalui kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, tidak sekadar menyalin model pembangunan dari pusat.

Agar tujuan pembangunan tercapai, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Kolaborasi ini membentuk ekosistem pembangunan yang inklusif dan inovatif. Pemerintah daerah harus menjadi fasilitator yang menciptakan ruang kolaborasi tersebut melalui regulasi yang kondusif dan alokasi sumber daya yang merata. Dengan pendekatan ini, pembangunan daerah akan memiliki legitimasi kuat dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis UMKM

Pengembangan ekonomi lokal merupakan strategi desentralistik dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan adaptif terhadap perubahan zaman. Menurut Sumodiningrat dan Wulandari (2016), pemberdayaan UMKM harus dimulai dari akses terhadap

modal, pelatihan manajerial, serta penguatan jaringan pasar lokal dan digital. Tanpa dukungan ekosistem yang memadai, UMKM sulit bersaing dan bertahan di tengah tantangan ekonomi global.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Ini mencakup penyediaan infrastruktur dasar, kemudahan perizinan, dan insentif fiskal yang berpihak pada pelaku usaha kecil. Program Dumisake merupakan langkah afirmatif untuk menjawab kebutuhan modal bagi kelompok usaha mikro, terutama bagi pemula dan pelaku usaha dari kelompok rentan. Namun keberhasilan program sangat bergantung pada kesinambungan kebijakan dan integrasi lintas sektor.

Selain pendekatan top-down dari pemerintah, pengembangan ekonomi lokal juga memerlukan inisiatif komunitas dan partisipasi aktif masyarakat. UMKM tidak bisa hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang memiliki daya kreasi dan inovasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan pelaku usaha lokal dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Dengan demikian, UMKM akan tumbuh dalam ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan kemandirian ekonomi daerah.

Dinamika Politik Pembangunan Daerah

Dinamika politik lokal merupakan faktor kunci dalam menentukan arah pembangunan daerah. Putnam (1993) menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan sangat berkaitan dengan struktur sosial dan budaya politik yang berkembang di masyarakat. Dalam praktiknya, pembangunan daerah seringkali dipengaruhi oleh relasi kuasa, jaringan politik, dan kepentingan kelompok elite. Dalam konteks Program Dumisake, kecenderungan distribusi bantuan berdasarkan afiliasi politik mencerminkan peran besar patronase dalam birokrasi lokal.

Ketika pembangunan digunakan sebagai alat konsolidasi kekuasaan, maka tujuan keberlanjutan dan keadilan sosial akan sulit tercapai. Proses pengambilan keputusan yang tertutup dan minim partisipasi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem tata kelola yang transparan dan partisipatif. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan legitimasi dan efektivitas kebijakan.

Dalam konteks ini, penguatan kelembagaan lokal seperti BPD, forum musyawarah desa, dan lembaga pengawasan independen menjadi krusial. Pemerintah daerah perlu mendorong tumbuhnya budaya politik deliberatif yang menempatkan warga sebagai aktor aktif dalam pembangunan. Dengan cara ini, pembangunan daerah tidak hanya menjadi proyek pemerintah, tetapi menjadi gerakan kolektif yang dilandasi rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Program Dumisake dan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

Program Dumisake merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang mencoba menjawab kebutuhan riil masyarakat melalui intervensi ekonomi langsung. Dengan menysasar pelaku UMKM dari berbagai latar belakang, program ini berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Berdasarkan Petunjuk Teknis (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, 2023), program ini mencakup aspek seleksi penerima, penyaluran bantuan, serta monitoring dan evaluasi. Namun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan teknis dan politis.

Sebagai kebijakan ekonomi kerakyatan, Dumisake harus dijalankan dengan prinsip keadilan distribusi dan transparansi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap proses pelaksanaan berjalan secara objektif, bebas dari intervensi politik, dan mengedepankan prinsip meritokrasi. Bantuan yang diberikan harus disertai dengan pelatihan, pendampingan, dan

evaluasi agar menciptakan dampak jangka panjang. Dalam konteks ini, sinergi antarperangkat daerah dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program.

Ke depan, keberhasilan Program Dumisake harus diukur bukan hanya dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi dari transformasi sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Untuk itu, diperlukan sistem monitoring berbasis data, pelibatan komunitas dalam evaluasi, dan fleksibilitas kebijakan yang memungkinkan adaptasi terhadap dinamika lokal. Jika dikelola dengan baik, Dumisake dapat menjadi model replikasi untuk kebijakan ekonomi kerakyatan di daerah lain di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program Dumisake di Kecamatan Rimbo Bujang, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika politik pembangunan daerah dan pemberdayaan UMKM. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling relevan untuk mengkaji fenomena sosial-politik secara kontekstual dan interpretatif (Creswell, 2014).

1. Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Wilayah ini dipilih secara purposif karena merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak dan penerima bantuan Program Dumisake yang signifikan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis input (perencanaan dan penganggaran), proses (mekanisme penyaluran dan pendampingan), dan output (hasil serta dampak bantuan) dari program, serta dinamika politik yang memengaruhi implementasinya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data yang digunakan terdiri dari:

Data primer: diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews), observasi langsung, dan dokumentasi lapangan.

b. Data sekunder: berupa dokumen resmi pemerintah, laporan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, publikasi statistik daerah, serta kajian akademik dan media terkait Program Dumisake dan UMKM.

3. Teknik Pemilihan Informan

Informan dipilih secara purposive dengan kriteria memiliki keterlibatan langsung atau pengetahuan mendalam terkait implementasi Program Dumisake. Informan meliputi:

- a. Kepala dan staf Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi
- b. Aparatur kecamatan dan desa di Rimbo Bujang
- c. Pendamping UMKM/Dumisake
- d. Pelaku UMKM penerima dan non-penerima bantuan
- e. Tokoh masyarakat dan aktor politik lokal

Jumlah informan bersifat fleksibel, disesuaikan hingga mencapai saturasi data (data saturation), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak lagi menghasilkan penemuan baru.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara mendalam dilakukan dengan panduan semi-terstruktur agar terbuka terhadap eksplorasi isu baru di lapangan.
- b. Observasi partisipatif dilakukan untuk memantau praktik distribusi dan dinamika politik lokal terkait program.
- c. Studi dokumentasi meliputi analisis dokumen kebijakan, berita media, serta laporan kinerja OPD terkait.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif berdasarkan model Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga tahapan utama:

- a. Reduksi data: merangkum, memilah, dan memfokuskan data mentah sesuai tema penelitian.
- b. Penyajian data: menyusun data ke dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik.
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi: menemukan pola, hubungan antar-variabel, dan makna kontekstual dari data yang diperoleh.

Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Dumisake dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang

Program Dumisake merupakan strategi Pemerintah Provinsi Jambi dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi, dengan fokus pada pemberdayaan UMKM lokal. Di Kecamatan Rimbo Bujang, dari total 1.683 pelaku UMKM, hanya 135 yang menerima bantuan modal usaha, masing-masing antara Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000. Implementasi program dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi bekerja sama dengan pemerintah desa. Kegiatan dimulai dari tahap penjangkangan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan. Namun, pelaksanaan program masih terkonsentrasi pada distribusi dana. Pendampingan dan pelatihan usaha tidak dilakukan secara sistematis. Ini menyebabkan tujuan pemberdayaan belum sepenuhnya tercapai.

Proses seleksi UMKM penerima bantuan dilakukan melalui rekomendasi pemerintah desa yang seharusnya berdasarkan data dan kebutuhan lokal. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses ini belum berjalan optimal. Data UMKM di tingkat desa belum diperbarui dan tidak terdigitalisasi, sehingga menyebabkan seleksi dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif. Beberapa pelaku usaha yang sudah lama beroperasi justru tidak mendapatkan bantuan. Kriteria seleksi kurang transparan dan belum sepenuhnya menggunakan prinsip meritokrasi. Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan publik terganggu karena lemahnya input kebijakan. Hal ini mencerminkan ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Wawancara dengan penerima bantuan menunjukkan bahwa penggunaan dana sangat beragam, dari pembelian alat produksi hingga kebutuhan konsumtif. Minimnya pelatihan menyebabkan banyak pelaku UMKM tidak memahami pentingnya manajemen keuangan. Sebagian penerima bahkan tidak tahu cara membuat laporan pengeluaran usaha. Padahal, pemberdayaan tidak hanya berupa modal, tetapi juga kapasitas manajerial. Tanpa pendampingan, bantuan bersifat sementara dan tidak berdampak jangka panjang. Ini sesuai dengan pendapat Brinkerhoff dan Crosby (2002) bahwa kebijakan yang hanya bersifat distribusi tidak menjamin perubahan struktural. Oleh karena itu, program membutuhkan pendekatan integratif.

Monitoring dan evaluasi program belum dijalankan secara optimal. Tidak ada indikator kinerja yang digunakan untuk menilai dampak bantuan terhadap keberlanjutan usaha. Program juga belum memiliki mekanisme evaluasi partisipatif yang melibatkan penerima bantuan. Laporan pertanggungjawaban dari penerima tidak diwajibkan dan tidak tersedia format baku. Akibatnya, tidak ada data akurat yang bisa dijadikan dasar untuk mengukur efektivitas program.

Ini menunjukkan lemahnya output kebijakan dalam kerangka implementasi publik. Pemerintah daerah perlu menyusun sistem evaluasi berbasis indikator yang terukur. Sistem tersebut juga harus berbasis teknologi dan mudah diakses masyarakat.

Secara keseluruhan, bentuk implementasi Program Dumisake menunjukkan adanya kemauan politik pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui UMKM. Namun, pelaksanaannya masih terbatas pada aspek administratif dan finansial. Tanpa dukungan kelembagaan dan pelibatan masyarakat secara bermakna, program tidak akan mencapai dampak maksimal. Pemberdayaan harus dipahami sebagai proses jangka panjang, tidak hanya sebagai intervensi sesaat. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan ekonomi dan pemberdayaan sosial sangat dibutuhkan. Pemerintah juga harus mendorong kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro dan pelaku sektor swasta. Dengan demikian, program akan berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

Kolaborasi antar-stakeholder menjadi prasyarat penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan program berbasis pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam konteks ini, pendekatan *collaborative governance* sebagaimana dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya proses bersama antara aktor negara dan non-negara untuk membentuk kebijakan dan implementasi publik yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Implementasi Dumisake seharusnya mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, termasuk komitmen bersama, komunikasi terbuka, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme resolusi konflik lokal. Ketika proses ini dijalankan secara konsisten, maka relasi antara pemerintah desa, pelaku usaha, akademisi, dan mitra swasta dapat terbangun secara sinergis untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang lebih kuat.

Sayangnya, pola pelaksanaan Dumisake yang masih bersifat sektoral dan birokratis belum membuka ruang bagi pembelajaran adaptif antar aktor lokal. Hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dan demokrasi lokal yang seharusnya mendorong inovasi dari bawah (*bottom-up innovation*). Studi dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menyebutkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* sangat tergantung pada adanya kapasitas bersama (*shared capacity*) dan dinamika kepercayaan antara pelaksana dan penerima kebijakan. Dalam hal ini, pembangunan kepercayaan sosial (*social trust*) melalui transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi elemen kunci yang masih perlu diperkuat dalam pelaksanaan Dumisake di Kecamatan Rimbo Bujang.



Gambar 1. Alur Implementasi Program Dumisake dan Titik Kritis Pelaksanaan

Faktor Penghambat dalam Input, Proses, dan Output

Pada tahap input, penghambat utama adalah lemahnya sistem perencanaan dan basis data UMKM. Di sebagian besar desa seperti Jaya Mulya dan Tegal Arum, pendataan UMKM belum dilakukan secara berkala. Informasi yang digunakan untuk menyusun daftar penerima bersumber dari data lama dan tidak terverifikasi. Ini menyebabkan beberapa pelaku usaha produktif tidak terakomodasi. Selain itu, sosialisasi program tidak dilakukan secara merata. Beberapa desa bahkan tidak mengusulkan penerima karena kurang informasi. Menurut Dunn (2003), input yang tidak akurat akan berdampak pada kesalahan dalam tahap implementasi dan evaluasi.

Hambatan pada tahap proses muncul dalam bentuk rendahnya koordinasi antar instansi pelaksana. Tidak ada standar operasional prosedur (SOP) yang baku dalam seleksi dan pengawasan program. Pelaksana di tingkat desa tidak mendapat pelatihan teknis mengenai pelaksanaan program. Proses seleksi juga tidak melibatkan masyarakat secara terbuka, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan. Informasi terkait syarat dan mekanisme pengajuan bantuan tidak disebarluaskan secara transparan. Hal ini membuat proses seleksi tidak inklusif dan tidak berbasis kebutuhan. Seharusnya, proses implementasi melibatkan seluruh aktor lokal untuk menjamin partisipasi.

Pada tahap output, kendala utama adalah minimnya dampak nyata pada peningkatan kapasitas usaha. Berdasarkan data survei lapangan, hanya 6 dari 20 penerima bantuan yang mengalami kenaikan pendapatan usaha dalam tiga bulan pertama. Sebagian lainnya justru mengalami stagnasi atau mengalihkan dana untuk kebutuhan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa bantuan belum dimanfaatkan secara produktif. Penyebab utamanya adalah tidak adanya pelatihan lanjutan, minimnya kontrol pascapenyialuran, dan lemahnya pemahaman manajerial pelaku usaha. Goggin et al. (1990) menyatakan bahwa tanpa pelatihan dan evaluasi, implementasi kebijakan akan bersifat simbolik.

Faktor penghambat lainnya adalah rendahnya pengawasan dan akuntabilitas. Tidak ada laporan pemanfaatan dana yang diwajibkan kepada penerima. Aparat pelaksana juga tidak melakukan kunjungan lapangan pascapenyialuran. Ini membuat efektivitas program tidak dapat diukur secara objektif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan dana bantuan. Akibatnya, insentif untuk mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan menjadi rendah. Hal ini menunjukkan perlunya desain sistem kontrol berbasis komunitas. Sistem ini bisa dibangun melalui kelompok usaha bersama atau koperasi desa yang berperan sebagai pengawas internal.

Secara keseluruhan, hambatan dalam tahap input, proses, dan output bersumber dari kelemahan tata kelola dan keterbatasan kapasitas pelaksana. Tanpa sistem pendukung yang kuat, program akan sulit mencapai tujuan pemberdayaan. Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi administratif dalam pengelolaan program. Ini meliputi pembentukan basis data UMKM berbasis digital, peningkatan pelatihan aparat pelaksana, dan pelibatan masyarakat sipil. Dengan demikian, keberhasilan program bisa ditingkatkan dan ketimpangan distribusi dapat dikurangi. Perlu ada audit sosial tahunan untuk menilai kinerja program secara transparan dan akuntabel.

Hambatan pada tahap input juga berkaitan erat dengan kurangnya pelibatan aktor lokal dalam perumusan strategi implementasi program. Pemerintah desa sering kali diposisikan hanya sebagai pelaksana teknis, bukan sebagai mitra dalam perencanaan. Akibatnya, pelaksanaan program di tingkat desa tidak memperhitungkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang spesifik. Dalam kerangka *contextual implementation theory*, Grindle (1980) menyatakan bahwa faktor konteks lokal—seperti budaya birokrasi, kekuatan politik, dan kondisi ekonomi—sangat

memengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Ketika konteks lokal diabaikan, maka potensi keberhasilan kebijakan juga berkurang.

Lebih lanjut, proses koordinasi lintas lembaga yang lemah menunjukkan belum adanya *governance mechanism* yang terstruktur antara Dinas Koperasi dan UKM, pemerintah kecamatan, dan desa. Masing-masing unit kerja menjalankan perannya tanpa pedoman terpadu dan tanpa sistem pelaporan yang saling terintegrasi. Akibatnya, tidak hanya terjadi tumpang tindih fungsi, tetapi juga kesenjangan informasi antarlembaga. Seharusnya, implementasi kebijakan publik yang kompleks seperti program Dumisake dijalankan dalam kerangka *network governance*, di mana hubungan antaraktor tidak bersifat hierarkis, melainkan kolaboratif dengan prinsip koordinasi horizontal dan pertukaran informasi yang konsisten.

Pada tingkat output, selain kurangnya dampak ekonomi, terdapat pula ketimpangan spasial antarwilayah dalam distribusi manfaat program. Desa-desa yang memiliki hubungan dekat dengan jaringan birokrasi atau politik tertentu lebih sering menerima alokasi bantuan. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi diskriminasi antar desa dalam satu kecamatan. Ketiadaan parameter alokasi yang jelas dan transparan menyebabkan ruang intervensi politik semakin terbuka. Padahal menurut prinsip *equity-based implementation*, distribusi sumber daya publik harus mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas riil setiap komunitas, bukan berdasarkan kedekatan atau kekuasaan.

Tidak kalah penting adalah lemahnya kapasitas evaluatif dalam struktur program. Evaluasi yang dilakukan lebih bersifat administratif daripada substantif. Artinya, yang dinilai hanyalah sejauh mana dana tersalurkan, bukan bagaimana dampaknya terhadap perubahan sosial dan ekonomi penerima. Evaluasi berbasis hasil (*result-based evaluation*) belum menjadi standar dalam pelaksanaan Dumisake. Padahal pendekatan ini penting untuk melihat apakah program benar-benar mendorong peningkatan pendapatan, kemandirian usaha, atau inovasi ekonomi lokal. Tanpa evaluasi semacam ini, kebijakan akan terjebak dalam rutinitas pelaporan tanpa refleksi.

Akhirnya, seluruh hambatan tersebut menunjukkan pentingnya reformasi manajemen program berbasis prinsip *adaptive governance*. Dalam kerangka ini, kebijakan publik dipandang sebagai proses yang dinamis, yang menuntut kemampuan beradaptasi terhadap umpan balik lapangan, perubahan kebutuhan masyarakat, serta ketidakpastian politik dan ekonomi. Pemerintah daerah perlu merancang program pemberdayaan UMKM yang tidak hanya responsif secara kebijakan, tetapi juga fleksibel secara struktural. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan panduan teknis yang terbuka untuk disesuaikan secara lokal, pembentukan tim evaluasi independen, dan pelatihan berkala bagi semua pelaksana di lapangan.



Gambar 2. Faktor Penghambat Program Dumisake Berdasarkan Tahapan Implementasi

Dinamika Politik Lokal dan Dampaknya terhadap Program Dumisake

Dinamika politik lokal berperan besar dalam memengaruhi arah dan implementasi Program Dumisake. Beberapa kepala desa diketahui menggunakan kewenangan mereka untuk mengatur distribusi bantuan secara tidak objektif. Wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Perintis menunjukkan bahwa sebagian besar penerima merupakan simpatisan kepala desa yang terpilih pada Pilkades 2022. Praktik seperti ini mencerminkan patronase politik yang masih kuat di tingkat lokal. Putnam (1993) menyebut bahwa struktur kekuasaan informal seringkali mendistorsi niat awal kebijakan publik. Ini membuat kebijakan lebih bersifat transaksional daripada transformasional.

Pola relasi antara aktor lokal menciptakan dominasi elite dalam pengambilan keputusan. Masyarakat tidak terlibat dalam forum musyawarah untuk membahas daftar penerima bantuan. Bahkan, hasil seleksi tidak diumumkan secara terbuka, sehingga menimbulkan kecurigaan. Ketertutupan informasi ini menurunkan tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa. Padahal, partisipasi warga merupakan syarat mutlak bagi kebijakan yang responsif dan adil. Fox (2007) menekankan pentingnya *accountability politics*, yaitu ketika warga dapat menuntut pertanggungjawaban melalui kanal formal dan informal. Tanpa hal tersebut, kebijakan akan kehilangan legitimasi.

Sebagian masyarakat menunjukkan resistensi terhadap program akibat ketidakjelasan mekanisme dan bias penerima. Beberapa pelaku usaha yang aktif mengikuti pelatihan dan memiliki usaha legal justru tidak mendapat bantuan. Ini menimbulkan kesan bahwa program lebih bernuansa politis daripada profesional. Dinamika ini menyebabkan rendahnya partisipasi dalam evaluasi program dan munculnya apatisme sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan merusak semangat kolaborasi pembangunan desa. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola politik lokal harus menjadi bagian dari reformasi kebijakan.

Kelemahan lain adalah tidak adanya mekanisme pengaduan yang jelas. Warga yang merasa dirugikan tidak tahu ke mana harus menyampaikan keluhan. Pemerintah desa tidak menyediakan kotak saran, hotline, atau media pelaporan daring. Ini membatasi ruang partisipasi warga dalam mengontrol jalannya program. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu membentuk lembaga independen di tingkat kecamatan yang bertugas menerima laporan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berasal dari atas, tetapi juga dari bawah. Ini akan mendorong terciptanya keseimbangan kekuasaan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dinamika politik lokal dalam Program Dumisake menunjukkan bahwa kekuatan informal memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pembangunan. Jika tidak diatur dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai, kekuasaan lokal justru menjadi sumber ketimpangan. Oleh karena itu, reformasi pemerintahan desa perlu diarahkan untuk membatasi ruang penyalahgunaan wewenang. Penguatan kapasitas BPD, keterbukaan data, dan peningkatan literasi politik warga merupakan langkah strategis. Selain itu, perlu dikembangkan sistem transparansi digital agar setiap warga dapat memantau pelaksanaan program secara real time. Semua ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin keadilan kebijakan.

Dinamika kekuasaan lokal dalam implementasi Program Dumisake juga mencerminkan pola *asymmetric accountability*, di mana kekuasaan lebih banyak terkonsentrasi pada aktor eksekutif desa tanpa kontrol yang memadai dari lembaga pengawas. Dalam banyak kasus, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, baik karena keterbatasan kapasitas maupun relasi patron-klien dengan kepala desa. Hal ini menyebabkan *check and balance* dalam tata kelola program tidak berjalan. Sebagaimana dijelaskan oleh Grindle (2007), reformasi kebijakan di tingkat lokal seringkali terhambat oleh

politik informal yang lebih kuat dibandingkan aturan formal yang tertulis dalam regulasi.

Selain kekuasaan informal, aspek politik anggaran juga berperan dalam menentukan keberlanjutan program. Bantuan UMKM melalui Program Dumisake kerap kali dipolitisasi menjelang tahun politik atau pilkada. Hal ini menyebabkan anggaran program lebih bersifat populis daripada berorientasi pada pemberdayaan struktural. Tanpa sistem penganggaran berbasis kinerja dan kebutuhan lokal yang terukur, program akan terus terjebak dalam siklus politisasi dan tidak memiliki kesinambungan. Dalam jangka panjang, ketergantungan program terhadap elite politik akan menciptakan ketimpangan antara desa yang memiliki jaringan politik kuat dan desa yang tidak. Oleh karena itu, perencanaan anggaran berbasis partisipatif dan evidence-based perlu diperkuat di semua tingkatan pemerintahan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting bagi pemerintah daerah dan desa mengadopsi pendekatan *deliberative governance*—yakni tata kelola yang menempatkan dialog, transparansi, dan konsensus sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Forum-forum seperti Musrenbangdes harus direvitalisasi agar menjadi ruang deliberatif yang terbuka bagi semua unsur masyarakat, termasuk kelompok marjinal seperti perempuan, pemuda, dan pelaku UMKM. Partisipasi yang bersifat prosedural harus ditingkatkan menjadi partisipasi substantif, di mana warga tidak hanya hadir tetapi juga memiliki kekuatan dalam menentukan arah kebijakan. Ketika ruang dialog ini terbuka dan setara, maka program seperti Dumisake akan lebih mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya menjadi alat konsolidasi kekuasaan lokal.



Gambar 3. Dinamika Politik Lokal dalam Implementasi Program

PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi Program Dumisake di Kecamatan Rimbo Bujang masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemberdayaan UMKM. Bantuan modal telah

disalurkan, namun minimnya pelatihan dan pendampingan membuat dampaknya terhadap keberlanjutan usaha masih rendah.

2. Terdapat berbagai hambatan pada tahap input, proses, dan output pelaksanaan program. Kurangnya data UMKM yang valid, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta tidak adanya sistem evaluasi kinerja menyebabkan pelaksanaan program kurang efektif dan tidak terarah.
3. Dinamika politik lokal memengaruhi distribusi bantuan dan partisipasi masyarakat. Praktik patronase dan minimnya akuntabilitas menyebabkan rendahnya kepercayaan publik serta ketimpangan dalam pelaksanaan program di tingkat desa.

Saran

1. Perbaiki sistem pendataan dan perencanaan program berbasis data yang akurat dan terbaru. Pemerintah desa dan kecamatan perlu menyusun profil UMKM secara digital sebagai dasar seleksi penerima bantuan yang lebih objektif dan adil.
2. Tingkatkan pelatihan dan pendampingan usaha secara berkala. Pelaku UMKM harus dibekali keterampilan manajemen, pemasaran, dan akses pasar agar bantuan modal tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi produktif dan berkelanjutan.
3. Perkuat transparansi dan pengawasan publik. Pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi masyarakat melalui forum evaluasi, menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas, serta mencegah intervensi politik dalam pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214. <https://doi.org/10.1080/00074910302013>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Brinkerhoff, D. W., & Crosby, B. L. (2002). *Managing policy reform: Concepts and tools for decision-makers in developing and transitioning countries*. Kumarian Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. (2022). *Laporan tahunan program Dumisake*. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. (2023a). *Petunjuk teknis program Dumisake*. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. (2023b). *Laporan pelaksanaan program Dumisake di Kecamatan Rimbo Bujang*. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi.
- Dror, Y. (1971). *Design for policy sciences*. Elsevier.
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Pearson Education.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fox, J. (2007). *Accountability politics: Power and voice in rural Mexico*. Oxford University Press.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2001). Deepening democracy: Innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*, 29(1), 5–41.

<https://doi.org/10.1177/0032329201029001001>

- Goggin, M. L., Bowman, A. O., Lester, J. P., & O'Toole, L. J. (1990). *Implementation theory and practice: Toward a third generation*. Scott, Foresman.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Grindle, M. S. (2007). *Going local: Decentralization, democratization, and the promise of good governance*. Princeton University Press.
- Kesmawan, A. P., & Marja, A. (2021). Strategi politik calon legislatif muda Partai Perindo dalam memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019 Kabupaten Merangin. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 2(2), 68–79. <https://doi.org/10.36355/jppd.v2i2.19>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Putra Kesmawan, A. (2021). Public sector innovations in Indonesia: A systematic review. In *The 1st Virtual Conference on Social Science in Law, Political Issue and Economic Development* (pp. 340–350). <https://doi.org/10.2478/9788366675377-045>
- Putra Kesmawan, A., & Mutiarin, D. (2014). Implementasi kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 1(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0017>
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1982). *Bureaucracy and policy implementation*. Dorsey Press.
- Sumodiningrat, G., & Wulandari, D. (2016). *Pembangunan partisipatif dan ekonomi lokal*. LP3ES.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed.). Addison-Wesley.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.